

Efektifitas Penerapan model pengukuran kinerja berdasarkan LAKIP

Studi Kasus: Di Kota Gorontalo

¹Dharmawaty S. Makur

¹Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Abstract

Dharmawaty S. Makur. 2018. *The accuracy in choosing performance measurement model is expected to give positive impact to local government in managing an organization. This situation is in line with the performance measurement model of Government Institution Performance Accountability Report (LAKIP) with orientation to achievement goals of inputs, processes, outputs, outcomes, benefits and impacts to the community. This research intends to know the effectiveness of applying LAKIP performance measurement model in Gorontalo city government. This study uses a qualitative study with a review approach (Creswell, 2013, Miles, Huberman and Saldana, 2014). Document data was analyzed using content analysis and interactive model. The results of the study indicate that the implementation of LAKIP performance measurement model in Gorontalo city government still focuses on the measurement of financial performance with performance target that can be reached up to the stage of output performance.*

Keywords: Performance, performance measurement, orientation of performance measurement.

Abstrak

Dharmawaty S. Makur. 2018. Ketepatan dalam memilih model pengukuran kinerja diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada pemerintah daerah dalam mengelola suatu organisasi. Keadaan ini sejalan dengan model pengukuran kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan orientasi kepada sasaran kinerja input, proses, output, outcome, manfaat dan dampak kepada masyarakat. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui efektifitas penerapan model pengukuran kinerja LAKIP di pemerintah Kota Gorontalo. Kajian ini menggunakan kajian kualitatif dengan pendekatan kajian kes (Creswell, 2013; Miles, Huberman dan Saldana, 2014). Data dokumen dianalisis dengan menggunakan analisis isi dan model interaktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan model pengukuran kinerja LAKIP di pemerintah Kota Gorontalo masih memfokus kepada pengukuran kinerja keuangan dengan sasaran kinerja yang boleh dicapai sampai pada tahap kinerja output.

Kata Kunci: Kinerja; pengukuran kinerja; model pengukuran kinerja; orientasi pengukuran kinerja.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah seyogyanya memberi keleluasan kepada pemerintah daerah di dalam mengelola daerah masing-masing dengan memaksimalkan pengelolaan potensi daerah sebagai sumber keuangan daerah yang utama seperti yang dikehendaki oleh undang-undang 22 tahun 1999 dan undang-undang nomor 25 tahun 1999. Berlakunya ke dua undang-undang tersebut, maka pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Gorontalo diharapkan dapat mengelola daerah dengan menggunakan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain.

Namun demikian, setelah otonomi daerah efektif dilaksanakan maka kinerja keuangan pemerintah Kota Gorontalo masih berada pada tahap yang masih rendah yang menyebabkan ketergantungan kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi. Data dan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kota Gorontalo untuk tahun 2017 hanya mencapai 18,17 persen dari total belanja yang diperlukan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2018). Keadaan ini juga sejalan dengan pandangan Yusuf (2018) bahwa konsep otonomi daerah yang diharapkan oleh pemerintah belum terlaksana dengan

baik karena pemerintah di daerah hanya berlomba untuk membuat program dan membelanjakan dana yang diterima dan belum berpikir untuk menghasilkan dampak kepada masyarakat.

Literature

Kinerja merupakan suatu hasil dari suatu pekerjaan yang diperoleh dari input dan proses yang berhubungan dengan keperluan organisasi. Hal ini sangat penting menurut Van-Dooren, Bouckaert & Halligan (2015). Mereka menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu hasil yang diperoleh melalui kualitas tindakan yang sesuai dengan keperluan organisasi untuk mendapatkan hasil yang berkualitas. Tidak jauh berbeda dengan pandangan Briggs (1997) dan Gibson, Ivancevich dan Donnelly (1996). Pada umumnya mereka menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan aspek fasilitas, lingkungan kerja dan manajemen organisasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kinerja adalah suatu capaian terhadap visi organisasi yang telah ditetapkan, dengan memanfaatkan informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran kinerja

(Kroll, 2017). Hal ini penting menurut Talbot (2010) dan Broadbent dan Laughlin (2009). Mereka menyatakan bahwa setiap informasi yang diperoleh dari pengukuran kinerja dapat digunakan oleh pimpinan organisasi dalam membuat; 1) perencanaan kinerja; 2) pengukuran kinerja; dan 3) dan dapat berlanjut kepada penilaian kinerja. Pentingnya pengukuran kinerja juga sejalan dengan hasil kajian Radnor dan Barnes (2007); Jann and Jantz (2008). Mereka menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan penentuan kinerja secara periodik terhadap efektifitas dan efisiensi organisasi berdasarkan tujuan, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan beberapa pandangan tentang pengukuran kinerja, maka Vande Walle (2008) memandang bahwa pengukuran kinerja yang efektif mesti boleh mengintegrasikan data keuangan dan data bukan keuangan dalam menghasilkan informasi kinerja secara menyeluruh. Keadaan ini juga sejalan dengan Hansen dan Mowen (2004) yang menyatakan bahwa pengukuran kinerja pemerintah daerah dalam organisasi sektor awam boleh dilihat dari dua aspek iaitu aspek keuangan dan aspek bukan keuangan. Hal ini penting menurut Bruijn (2002) sebab pengukuran kinerja organisasi sektor publik mempunyai

dampak dalam mengelola organisasi untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi penggunaan sumber daya organisasi melalui penggunaan informasi kinerja yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian yang telah dibuat, memberi informasi bahwa pengukuran kinerja penting dilakukan untuk mendapatkan informasi organisasi yang boleh digunakan oleh pimpinan dalam melakukan pengambilan keputusan secara efektif dan efisien. Namun demikian pimpinan organisasi harus menetapkan model pengukuran kinerja yang sesuai agar informasi yang diperoleh sesuai dengan keperluan organisasi (Kroll, 2015). Keadaan ini juga sejalan dengan pendapat Bryde (2003); Mir dan Pinnington (2013;2014); Hourneaux, Carneiro-da-Cunha, dan Hamilton (2017) yang menyatakan bahwa model pengukuran kinerja merupakan suatu model pengukuran yang digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mendapatkan informasi sesuai dengan keperluan organisasi.

Pentingnya model pengukuran kinerja yang sesuai, juga sejalan dengan pandangan Albach, Meffert, Pinkwart dan Reichwald (2015); Chatzoglou, Chatzoudes, Vraimaki, dan Diamantidis (2013), dan Rajnoha, Lesníková, dan Korauš (2016). Mereka

menyatakan bahwa setiap model pengukuran kinerja yang digunakan diharapkan dapat memberi dampak kepada organisasi dalam mencapai kinerja secara terus menerus dengan melakukan berbagai perubahan. Morrison (2016) pula berpendapat bahwa penggunaan model pengukuran kinerja yang sesuai dapat membantu pimpinan dalam mendapatkan pemahaman terhadap efektivitas suatu organisasi termasuk model pengukuran kinerja yang digunakan pemerintah daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 yang indikatornya meliputi; input, proses, output, outcome, manfaat dan dampak kepada masyarakat.

HASIL PENELITIAN

Data yang diperoleh dari data dokumen yang di analisis berdasarkan content analisis seperti yang diharapkan oleh Creswell (2013) dan Miles, Huberman dan Saldana (2013). Dari data dokumen didapatkan bahwa pelaporan kinerja pemerintah daerah setiap tahunnya hanya boleh menyajikan laporan kinerja keuangan semata (Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010). Demikian pula sebelumnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 bahwa laporan kinerja keuangan pemerintah hanya meliputi; Laporan Realisasi Anggaran;

Neraca; Laporan Arus Kas; dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian melalui analisis dokumen dan hasil wawancara memberi informasi bahwa model pengukuran kinerja LAKIP yang digunakan pemerintah daerah Kota Gorontalo selama ini masih fokus kepada pengukuran kinerja keuangan dan tidak memberi perhatian kepada pengukuran kinerja non keuangan secara menyeluruh. Temuan dalam penelitian ini juga memberi informasi bahwa model pengukuran kinerja LAKIP yang masih fokus kepada kinerja keuangan boleh menyebabkan sasaran kinerja yang dicapai hanya fokus kepada sasaran kinerja output, yang sangat jauh dengan yang diharapkan oleh pemerintah melalui inpres nomor 7 tahun 1999 yang menghendaki agar sasaran kinerja pemerintah daerah boleh mencapai tahap kinerja outcome, manfaat dan dampak kepada masyarakat.

Hasil penelitian bertentangan dengan beberapa hasil kajian mengenai efektifitas suatu model pengukuran kinerja khususnya dalam organisasi sektor publik. Pada umumnya hasil-hasil kajian terdahulu mengharapakan agar pengukuran kinerja organisasi sektor publik bukan saja fokus kepada pengukuran kinerja keuangan tetapi mesti dilakukan secara menyeluruh dengan

menfokus kepada pengukuran kinerja bukan keuangan agar sasaran kinerja yang dicapai bukan hanya fokus kepada sasaran kinerja keluaran tetapi boleh mencapai sasaran kinerja yang lebih baik itu output, manfaat dan impak kepada masyarakat (Prasojo, 2014; Sri-Mulyani, 2017). Hasil penelitian lain seperti Van-Dooren (2015) juga mengatakan bahwa suatu model pengukuran kinerja yang diterapkan seharusnya memberi perhatian aspek keuangan dan aspek non keuangan dalam pengukuran kinerja. Menurut beliau bahwa informasi kinerja yang dihasilkan dengan memberi perhatian kepada aspek keuangan dan aspek non keuangan akan memudahkan pemerintah daerah dalam mengelola organisasi kepada tujuan yang lebih baik dan tepat sasaran.

Hasil penelitian yang lain juga menghendaki agar model pengukuran kinerja yang digunakan dengan menggunakan anggaran berbasis kinerja diharapkan dapat mengukur kinerja organisasi secara menyeluruh agar setiap penggunaan kekayaan organisasi memberi hasil kepada masyarakat (Albach, *et al*, 2015). Hasil penelitian yang lain seperti Chatzoglou, Vraimaki, dan Diamantidis (2013) menyatakan bahwa setiap model pengukuran kinerja yang digunakan dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja

diharapkan dapat memberi dampak kepada organisasi dalam mencapai kinerja secara terus menerus dengan melakukan berbagai perubahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh maka diperoleh informasi bahwa model pengukuran kinerja yang digunakan oleh pemerintah kota Gorontalo dalam melaporkan setiap program dan penggunaan sumber-sumber organisasi masih memberi fokus kepada pengukuran kinerja keuangan. Hal ini menyebabkan kinerja pemerintah daerah hanya boleh diukur dari keuangan tanpa boleh mengentahui kinerja yang lain seperti kinerja terhadap sumber daya manusia, fasilitas dan kinerja tingkat pertumbuhan dan pembelajaran organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Albach, H., Meffert, H., Pinkwart, A., & Reichwald, R. (2015). *Management of permanent change*. London: Springer Gabler. <http://doi.org/10.1007/978-3-658-05014-6> ISBN
- Briggs, M. (1997). Type Indicator and dental school performance. *Journal of Dental education* December, 61 (12) 928-933.
- Broadbent, J., & Laughlin, R. (2009). Performance management systems: a conceptual model. *Management Accounting Research*, 20(4), 283–295. <http://doi.org/10.1016/j.mar.2009.07.04>

- Bryde, D. (2003). Modelling project management performance. *project management Performance*, 20(2), 229–254.
<http://doi.org/10.1108/02656710310456635>
- Chatzoglou, P., Chatzoudes, D., Vraimaki, E., & Diamantidis, A. (2013). Service quality in the public sector: the case of the citizen's service centers of Greece. Prodromos Chatzoglou, Dimitrios Chatzoudes, Eftichia Vraimaki and Anastasios Diamantidis, 62(6), 583–605.
- Creswell, J. (2013). *Qualitative inquiry and research design*. Choosing among five approaches (3rd Ed.). London: Sage publication Inc.
<http://doi.org/10.1111/1467-9299.00177>
- De Bruijn, H. (2002). Performance Measurement in the Public Sector: Strategies to Cope with the Risks of Performance Measurement." *International Journal of Public Sector Management* 15 (7): 578-594.
- Gibson, Ivancevich, dan Donelly. 1996. Organisasi. Erlangga : Jakarta.
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2004). Management Accounting. (7th ed). South-Western Pub.
- Hourneaux, F., Carneiro-da-Cunha, A., & Hamilton, L. (2017). Performance measurement and management systems: different usages in Brazilian manufacturing companies. *Managerial Auditing Journal*, 32(2), 1–18.
<http://doi.org/doi/pdfplus/10.1108/MAJ-11-2015-1277>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 pada Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Pp1-4.
<http://jatim.kemenag.go.id/file/file/per.ttg PNS/>.
- Jann, W, Jantz, B (2008) A better performance of performance management? In: KPMG, CAPAM, IPAA, IPAC, Holy Grail or Achievable Quest. International Perspectives on Public Sector Performance Management. Zürich: KPMG International, 11–25.
- Kroll, A. (2015). Drivers of performance information use: systematic literature review and directions for future research. *Public Performance & Management Review*, 38(3), 459–486.
<http://doi.org/10.1080/15309576.2015.1006469>
- Menteri keuangan bagian direktorat jenderal perimbangan keuangan republik Indonesia (2017).
<http://www.djpk.depkeu.go.id/>. Dimuat turun pada tarikh 09 Feb. 2017.
- Miles, M., Huberman, A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis*. a methods sourcebook (3rd Ed.). London: Sage publication Inc
- Mir, F. ., & Pinnington, A. (2013). Exploring the value of project management: linking project management performance and project success. *International Journal of Project Management* (12), 1–16.
<http://doi.org/org/10.1016/j.ijproman>
- Mir, F., & Pinnington, A. (2014). Exploring the value of project management: linking project management performance and project success. *International Journal of Project Management*, 32, 202–217.
<http://doi.org/org/10.1016/j.ijproman.2013.05.012>

- Prasojo, E. (2014, Nopember, 25). Tantangan birokrasi pemerintahan Jokowi-JK. *Kompas.com*.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/11/25/12000021/Tantangan.Birokrasi.Pemerintahan>
- Radnor, Z. & Barnes, D. (2007), Historical analysis of performance measurement and management in operations management, *International Journal of Productivity and Performance Management*.
- Rajnoha, R., Lesníková, P., & Korauš, A. (2016). From financial measures to strategic performance measurement system and corporate sustainability. *Empirical evidence from Slovakia*, 9(4), 134–152. <http://doi.org/DOI:10.14254/2071-789X.2016/9-4/8>
- Republik Indonesia .(2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sri Mulyani, I. (2017, Desember 5). Di depan anggota parpol, Sri Mulyani: 70,9% APBD untuk Gaji. *Detik Finance*.
<https://pemeriksaanajak.com/2017/12/05/di-depan-anggota-parpol-srimulyani-709-apbd-untuk-gaji/>.
- Talbot, C. (2010). *Theories of performance: organizational and service improvement in the public domain* (1st Ed.). Oxford-England: New York. Oxford University Press Inc
- Undang-undang No. 22 pada Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=3>.
Dimuat turun tarikh 29 Dec. 2017.
- Undang-undang No. 25 pada Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
<http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-25-1999.pdf>. Dimuat turun tarikh 29 Dec. 2017.
- Van de Walle .(2008). Comparing the Performance of National Public Sectors: Conceptual Problems. *International Journal of Productivity and Performance Management* 57(4)35. DOI:10.1108/17410400810867535
- Van-Dooren, W., Bouckaert, G., & Halligan, J. (2015). *Performance management in the public sector*. (2nd Ed.). Routledge New York- USA
- Yusuf, K .(2018, April 25). Wapres ingatkan daerah agar tak terus bergantung kepada pemerintah pusat. *Kompas.Com*.

